

**ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT PENGUNGKAPAN PADA INSTRUMEN
KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN *INTERNATIONAL
FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS) NO. 7*
(Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Periode 2008-2015)**

**Selvy Maria Ulfah
Devi Farah Azizah**
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang
Email: selvymariaulfah23@gmail.com

ABSTRACT

The financial statements can describe the condition of a company. It requires companies in each country to set a standard in the financial statements to facilitate investors understand the financial statements. The standard used by G20 member countries in which Indonesia's included is the International Financial Reporting Standard (IFRS). The IFRS difference with the previous standard of US GAAP is based on principles, applying measurement through fair value and more disclosure on financial instruments. Disclosures on financial instruments are regulated in IFRS No. 7. The convergency IFRS in Indonesia falls on January 1st 2012. Thus the disclosure level will be different after the IFRS No. 7. The purpose of this research is finding financial instrument (FI) disclosure has increased significantly following International Financial Reporting Standard (IFRS) No. 7 on mining sector companies that listed by Indonesia Stock Exchange (IDX) before 2008 and publish their financial report on 2008-2015 period.

Keywords: Convergency IFRS, Fair Value, US GAAP, Principle Based

ABSTRAK

Laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan. Hal tersebut mengharuskan perusahaan disetiap negara untuk menetapkan suatu standar dalam laporan keuangan untuk memudahkan investor memahami laporan keuangan tersebut. standar yang digunakan oleh negara anggota G20 dimana Indonesia termasuk didalamnya adalah *International Financial Reporting Standard (IFRS)*. Perbedaan IFRS dengan standar sebelumnya yakni US GAAP yakni IFRS berbasis prinsip, menerapkan pengukuran melalui nilai wajar dan lebih banyak pengungkapan pada instrumen keuangan. Pengungkapan pada instrumen keuangan diatur dalam IFRS No. 7. Puncak konvergensi IFRS di Indonesia yakni pada 1 januari 2012. Dengan demikian tingkat pengungkapan akan berbeda setelah peneran IFRS No. 7. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat pengungkapan pada instrumen keuangan sebelum dan sesudah penerapan IFRS No. 7 di Indonesia pada perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum tahun 2008 dan menerbitkan laporan pada tahun 2008-2015.

Kata Kunci: Konvergensi IFRS, Nilai Wajar, US GAAP, Berbasis Prinsip

PENDAHULUAN

Tahun 2008, Indonesia melaksanakan konvergensi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (Martani, 2010). Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menetapkan bahwa tahun 2012 akan menjadi puncak konvergensi IFRS di Indonesia. Penerapan IFRS di Indonesia lebih lambat dibandingkan negara-negara di Uni Eropa yang telah menerapkan IFRS secara penuh mulai 1 Januari 2005 (Callao et al, 2007). Berbeda dengan negara-negara maju yang langsung mengadopsi penuh, Indonesia dan negara berkembang lainnya menerapkan standar tersebut secara bertahap (konvergensi). Konvergensi merupakan proses mengadopsi suatu ketentuan atau standar secara bertahap. IFRS ini wajib diterapkan oleh entitas dengan akuntabilitas seperti di BUMN, Emiten, Perusahaan Publik, Perbankan dan Asuransi (Martani, 2014).

Barth et al (2008) dalam Cahyonowati dan Ratmono (2012:105) mengatakan bahwa IFRS bersifat *principle based* yaitu lebih dapat meningkatkan relevansi informasi akuntansi. Hal ini dikarenakan standar berbasis prinsip tersebut menjelaskan setiap komponen secara luas dan detail. Manfaat lain dari standar berbasis prinsip adalah pengukuran dengan *fair value* yang lebih dapat menggambarkan dan menjelaskan kondisi kinerja suatu perusahaan (Cahyonowati dan Ratmono, 2012:105). Karakteristik IFRS yang berbasis prinsip (*principle based*) mengharuskan setiap komponen dalam laporan keuangan memiliki lebih banyak pengungkapan (Martani, 2013). Dengan demikian, standar berbasis prinsip menitikberatkan pada substansinya (Wahyuni, 2014).

International Financial Reporting Standards (IFRS) mendefinisikan daftar lengkap persyaratan pengungkapan terutama untuk instrumen keuangan. Persyaratan ini disajikan dalam IAS 32 dan IAS 39 yang berlaku untuk semua entitas membuat laporan keuangan berdasarkan IFRS. Persyaratan pengungkapan tambahan yang ditetapkan untuk bank dan lembaga keuangan lainnya di IAS 30. Persyaratan pengungkapan untuk instrumen keuangan dipindahkan, diperluas dan terkonsentrasi ke standar baru - IFRS No. 7 yang berlaku untuk semua entitas, termasuk bank dan lembaga keuangan, untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2007 (Helena, 2015:1).

Pengungkapan menurut IFRS yang diatur dalam IFRS No. 7 tentang Pengungkapan Instrumen Keuangan menjelaskan bahwa pengungkapan adalah informasi yang dilampirkan dalam laporan keuangan dalam bentuk catatan kaki atau lainnya yang dapat menjelaskan posisi keuangan dan kegiatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas (Siegel dan Shim 2005:147). Informasi-informasi tersebut dapat disajikan dalam laporan pemeriksaan baik secara kuantitatif (seperti komponen dolar dalam persediaan) maupun kualitatif (seperti dasar hukum). Entitas harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan untuk posisi keuangan dan kinerja keuangan (www.ifrs.org).

IFRS No. 7 telah memperkenalkan persyaratan pengungkapan baru. Tambahan utama persyaratan pengungkapan menggambarkan risiko secara luas seperti risiko pasar (risiko mata uang, risiko suku bunga dan risiko harga lainnya), risiko kredit dan risiko likuiditas (Barry J. Eppstein, Eva K. Jermakowicz, 2010 dalam Helena 2015:177). Catty, Vadron dan Isom (2010) dalam Helena (2012:177) menyebutkan tujuan IFRS 7 adalah untuk meminta entitas membuat pengungkapan yang memungkinkan bagi pengguna laporan keuangan dan mengevaluasi sifat dan risiko yang dapat timbul dari instrumen keuangan yaitu pengungkapan kuantitatif dan kualitatif. Dengan demikian pengungkapan harus meliputi syarat-syarat yang tertuang dalam setiap ayat dari IFRS No. 7.

Menurut Helena (2015 : 177) dalam penelitiannya tentang penerapan IFRS No. 7 pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Praha, tingkat pengungkapan paling tinggi adalah pada perusahaan di sektor pertambangan. Hal ini selaras dengan karakteristik sektor pertambangan yang membutuhkan investasi yang besar, jangka panjang dan sangat berisiko. Dengan demikian komponen pengungkapan yang ada dalam IFRS No. 7 sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi perusahaan tersebut. Selain itu, tingkat pengungkapan terus meningkat di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Yordania seiring dengan penerapan IFRS (Yasean at al. 2016 : 259). Namun, di Indonesia hal tersebut belum dapat dibuktikan secara ilmiah.

Dengan demikian, penelitian ini akan membandingkan tingkat pengungkapan sebelum dan sesudah konvergensi IFRS di Indonesia pada

perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan komponen pengungkapan yang disyaratkan dalam IFRS No. 7. Periode yang diambil oleh peneliti adalah tahun 2008-2015 atau selama 8 tahun mengingat puncak konvergensi IFRS di Indonesia pada tahun 2012. Dengan alasan yang telah dijabarkan pada latar belakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian penerapan IFRS 7 pada perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2015 dengan membandingkan tingkat pengungkapan sebelum dan sesudah penerapan IFRS No. 7 di Indonesia. Adapun judul yang diambil oleh peneliti, yaitu “**Analisis Perbedaan Tingkat Pengungkapan Pada Instrumen Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan *International Financial Reporting Standard* (IFRS) No.7** (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2015).

KAJIAN PUSTAKA

***International Financial Reporting Standard* (IFRS)**

Standar yang menjadi dasar dalam membentuk IFRS dikenal dengan *International Accounting Standard* (IAS). IAS diterbitkan antara tahun 1973 hingga 2001 oleh *International Accounting Standard Committee* (IASC). Menurut Kartikahadi, dkk. (2016:12) IAS merupakan Standar Akuntansi Internasional untuk pelaporan keuangan yang disusun oleh IASC. Pada tahun 2000, badan anggota IASC menyetujui restrukturisasi IASC dan sebuah konstitusi baru IASC. Pada Maret 2001, Dewan Pembina IASC mengeluarkan konstitusi baru IASC dan mendirikan perusahaan nirlaba bernama *International Foundation Accounting Standard Committee* untuk mengawasi *International Accounting Standard Board* (IASB). IASB adalah badan penetapan standar akuntansi yang berbasis di London. Terdiri dari 15 anggota dari sembilan negara termasuk Amerika Serikat. Pada tanggal 1 April 2001, IASB baru mengambil alih tanggung jawab dari IASC untuk menetapkan Standar Akuntansi Internasional (www.ifrs.org). IASB terus mengembangkan standarnya yang kini dikenal dengan istilah *International Financial Reporting Standard* (IFRS). IFRS merupakan pengembangan standar akuntansi yang dikembangkan oleh IASB berbasis standar global yang dipersiapkan untuk

laporan keuangan perusahaan yang telah didukung lebih dari 100 negara dan badan-badan internasional di dunia (www.iaiglobal.or.id). Standar Akuntansi Internasional disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu *International Accounting Standards Board* (IASB), *Commission of the Europe Union/Europe Commission* (EC), *International Organization of Securities Commission* (IOSCO), dan *International Federation of Accountants* (IFAC) (Choi et al, 1999). Sejak 1 April 2001, IASB menggantikan peran IASC dalam penyusunan standar akuntansi dan mulai menerbitkan IFRS.

Istilah yang berkaitan dengan IFRS dikenal sebagai adopsi dan konvergensi. Pada level negara, adopsi berarti penggantian secara langsung standar akuntansi nasional dengan IFRS. Istilah adopsi ini diambil oleh negara anggota *European Union* (EU) dimana sejak tahun 2005 telah memberlakukan IFRS secara penuh. Sedangkan konvergensi merupakan mekanisme bertahap yang dilakukan suatu negara untuk mengganti standar akuntansi nasional negaranya dengan IFRS untuk memperkecil perbedaan diantara keduanya. Konvergensi umumnya dilakukan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Walaupun bukan merupakan adopsi penuh, konvergensi menunjukkan sedikit perbedaan dengan IFRS. Perbedaan biasanya dalam hal waktu penerapan atau sedikit pengecualian dalam standar tertentu (iaiglobal.or.id : 2016).

IFRS 7 Tentang Pengungkapan Instrumen Keuangan

IFRS 7 tentang Pengungkapan Instrumen Keuangan mensyaratkan informasi tentang pentingnya pengungkapan instrumen keuangan untuk suatu entitas, serta sifat dan besarnya risiko yang timbul dari instrumen-instrumen keuangan, baik dari segi kualitatif dan kuantitatif. Pengungkapan khusus yang diperlukan sehubungan dengan aset keuangan yang ditransfer dan hal lainnya. IFRS membutuhkan pengungkapan tertentu yang akan disajikan berdasarkan kategori instrumen berdasarkan kategori pengukuran IAS 39. Pengungkapan instrumen keuangan merupakan suatu keharusan bagi kelompok entitas dalam mengklasifikasikan instrumen serupa yang sesuai dengan sifat informasi yang disajikan. (www.ifrs.org). Adapun pengungkapan yang tertuang dalam IFRS 7, yakni sebagai berikut.

Konvergensi IFRS di Indonesia

Terdapat 3 tahapan melakukan konvergensi IFRS di Indonesia yang dicanangkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, yaitu:

- 1) Tahap Adopsi (2008-2011), meliputi aktivitas dimana seluruh IFRS diadopsi ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan, dan evaluasi terhadap PSAK yang berlaku.
- 2) Tahap Persiapan Akhir (2011), dalam tahapan ini dilakukan penyelesaian terhadap persiapan infrastruktur yang diperlukan. Selanjutnya, dilakukan penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS.
- 3) Tahap Implementasi (2011), berhubungan dengan aktivitas penerapan PSAK-IFRS secara bertahap. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap dampak penerapan PSAK secara komprehensif.

Implementasi IFRS dapat memberikan dampak positif dan negatif dalam dunia bisnis dan jasa audit di Indonesia. Berikut ini adalah dampak dari penerapan IFRS menurut Bursa Efek Indonesia:

- 1) Dampak Pada Sistem Akuntansi:
 - a) Peningkatan penggunaan nilai wajar (*fair value*), terutama untuk properti investasi, beberapa aset tak berwujud, aset keuangan dan aset biologis.
 - b) Penggunaan "*Judgment*" karena karakteristik IFRS yang lebih berbasis prinsip (*principle based*).
 - c) Persyaratan pengungkapan yang lebih banyak baik kualitatif maupun kuantitatif, sejalan dengan data/informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan perusahaan.
- 2) Dampak Pada Sistem Informasi Perusahaan: Perubahan sistem akuntansi tentu akan berdampak pada perubahan sistem informasi di perusahaan karena perbedaan standar yang signifikan antara IFRS dan standar yang berlaku sebelumnya.
- 3) Dampak Pada Sumber Daya Manusia: Standar IFRS yang menganut prinsip dan bukan *rule based* sehingga para pemakai harus lebih banyak menggunakan *judgment*. Dibutuhkan sumber daya profesional yang memiliki kemampuan untuk melakukan *judgment* tersebut dalam menggunakan standar ini. Selain itu tidak hanya SDM yang terkait akuntansi, namun SDM

lain yang terkait juga harus memahami konsep standar IFRS.

- 4) Dampak Pada Sistem Organisasi Perusahaan: Penggunaan standar IFRS tidak hanya merubah cara organisasi membuat laporan keuangan, namun juga merubah bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya. Perlunya pengendalian internal, khususnya yang terkait dengan pelaporan keuangan agar perusahaan dapat memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan IFRS.

Fleksibilitas dalam standar IFRS yang bersifat *principle-based* akan berdampak pada tipe dan jumlah tim ahli yang seharusnya dimiliki oleh akuntan dan auditor. Pengadopsian IFRS mensyaratkan akuntan maupun auditor untuk memiliki pemahaman mengenai kerangka konseptual informasi keuangan agar dapat mengaplikasikan secara tepat dalam pembuatan keputusan. Pengadopsian IFRS mensyaratkan akuntan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kejadian maupun transaksi bisnis dan ekonomi perusahaan secara fundamental sebelum membuat *judgment*. Selain keahlian teknis, akuntan juga perlu memahami implikasi etis dan legal dalam implementasi standar (Carmona & Trombetta, 2008)

Pengadopsian IFRS juga menciptakan pasar yang luas bagi jasa audit. Berbagai estimasi yang dibuat oleh manajemen perlu dinilai kelayakannya oleh auditor sehingga auditor juga dituntut memiliki kemampuan menginterpretasi tujuan dari suatu standar. *AAA Financial Accounting Standard Committee* (2003) bahkan meyakini kemungkinan meningkatnya konflik antara auditor dan klien.

Pada tahun 2008 Indonesia mulai melaksanakan konvergensi IFRS terhadap standar akuntansi keuangan yang dilakukan bertahap dengan target penerapan dapat diselesaikan pada tahun 2012. Konvergensi IFRS di Indonesia pada tahun 2008 ditandai dengan berlaku efektifnya 3 PSAK berbasis *International Accounting Standard* (IAS) pada tahun tersebut. Selanjutnya disusul dengan 1 PSAK berbasis IAS yang berlaku efektif pada tahun 2009. Konvergensi berlanjut pada tahun 2010 dengan efektif berlakunya 3 PSAK berbasis IAS, 1 PSAK Berbasis IFRIC dan 5 pencabutan PSAK lama. Selanjutnya tahun 2011 terdapat 15 PSAK dan 6 ISAK berbasis IFRS yang berlaku efektif. Pada tahun 2012 sebagai tahun terakhir tahap konvergensi

IFRS, terdapat 15 PSAK dan 4 ISAK berbasis IFRS yang efektif.

Tabel 1. Kriteria Pengungkapan

No	Reference to IFRS 7 par.	Group of criteria
1	IFRS 7: 8	Categories of financial assets and financial liabilities
2	IFRS 7: 9 - 11	Financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss
3	IFRS 7: 12	Reclassification
4	IFRS 7: 13	Derecognition
5	IFRS 7: 14 – 15	Collateral
6	IFRS 7: 16	Allowance account for credit losses
7	IFRS 7: 17	Compound financial instruments with multiple embedded derivatives
8	IFRS 7: 18 – 19	Default and breaches
9	IFRS 7: 20	Statement of comprehensive income
10	IFRS 7: 21	Accounting policies
11	IFRS 7: 22 – 24	Hedge accounting
12	IFRS 7: 25 – 30	Fair value
13	IFRS 7: 31-42	Nature and extent of risks arising from financial instrument – general
14	IFRS 7: 33	Qualitative disclosures
15	IFRS 7: 34 – 42	Quantitative disclosures – general
16	IFRS 7: 36 – 38	Credit risk
17	IFRS 7: 39	Liquidity risk
18	IFRS 7: 40 – 42	Market risk

Sumber: draft IFRS No. 7 (www.ifrs.org : 2017) data diolah peneliti

Hipotesis

H₁ : Diduga terdapat perbedaan pengungkapan instrument keuangan sebelum dan sesudah penerapan IFRS No. 7

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan dengan pendekatan kuantitatif dan dilakukan pada perusahaan-perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui situs resmi di www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan *go public* yang bergerak di sektor pertambangan dan terdaftar di

Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan pada data yang diperoleh peneliti, terdapat populasi sebanyak 43 perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Dari 43 populasi diambil 15 sebagai sampel.

Hasil Dan Pembahasan

Tabel 2. Data Pengungkapan Instrumen Keuangan Sebelum Penerapan IFRS No. 7 di Indonesia

No	Sampel	Tahun				Jumlah
		2008	2009	2010	2011	
1	ANTM	8	6	10	9	33
2	APEX	0	0	10	10	20
3	BUMI	4	4	7	8	23
4	CKRA	2	4	4	8	18
5	DEWA	4	4	5	8	21
6	KKGI	3	5	8	9	25
7	MEDC	6	6	9	12	33
8	MIRA	5	7	8	9	29
9	MYOH	4	2	3	7	16
10	PSAB	2	0	3	11	16
11	PTBA	3	4	7	8	22
12	PTRO	3	6	6	10	25
13	RUIS	5	5	9	10	29
14	SMMT	0	0	5	7	12
15	TINS	0	6	7	7	20

Sumber: Data Diolah Tahun 2017

Tabel tersebut memaparkan tingkat pengungkapan pada masing-masing sampel selama tahun 2008 sampai 2011 atau sebelum konvergensi IFRS di Indonesia. Sebelum menerapkan IFRS, Indonesia menggunakan standar dari Amerika Serikat yakni *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) sebagai standar dalam laporan keuangan.

Tabel 3. Data Pengungkapan Instrumen Keuangan Sesudah Penerapan IFRS No. 7 di Indonesia

No	Sampel	Tahun				Jumlah
		2012	2013	2014	2015	
1	ANTM	10	12	11	10	43
2	APEX	11	12	13	11	47
3	BUMI	15	16	14	11	56
4	CKRA	9	7	8	13	37
5	DEWA	9	9	10	11	39
6	KKGI	10	9	12	13	44
7	MEDC	1	16	14	15	46
8	MIRA	11	12	12	12	47
9	MYOH	8	8	10	8	34
10	PSAB	12	14	11	11	48
11	PTBA	11	12	14	14	51
12	PTRO	8	12	11	13	44
13	RUIS	11	10	12	12	45
14	SMMT	10	13	11	12	46
15	TINS	11	9	9	12	41

Sumber: Data Diolah Tahun 2017

Tabel 2 menyajikan data tingkat pengungkapan pada instrumen keuangan sesudah penerapan IFRS No. 7. Data tersebut memaparkan jumlah tingkat pengungkapan pada masing-masing sampel pada tahun 2012-2015 atau sesudah konvergensi IFRS di Indonesia. Pengungkapan meningkat mengingat karakter IFRS yang berbasis prinsip. Perusahaan harus mengeluarkan pengungkapan-pengungkapan penting yang signifikan kepada pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Dalam IFRS sendiri standar dalam pengungkapan diatur dalam IFRS No. 7 tentang pengungkapan dalam instrument keuangan.

Tabel berikut ini merupakan perbandingan tingkat pengungkapan sebelum dan sesudah penerapan IFRS No. 7 di Indonesia.

Tabel 4. Data Tingkat Pengungkapan pada Instrumen Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan IFRS No. 7.

Sampel	Penerapan IFRS No. 7	
	SEBELUM	SESUDAH
ANTM	33	43
APEX	20	47
BUMI	23	56
CKRA	18	37
DEWA	21	39
KKGI	25	44
MEDC	33	46
MIRA	29	47
MYOH	16	34
PSAB	16	48
PTBA	22	51
PTRO	25	44
RUIS	29	45
SMMT	12	46
TINS	20	41

Sumber: Data Diolah Tahun 2017

Tabel 3 menunjukkan perbandingan tingkat pengungkapan pada instrument keuangan sebelum dan sesudah penerapan IFRS No. 7 di Indonesia secara menyeluruh. Data tersebut akan digunakan oleh peneliti untuk dilakukan pengujian hipotesis dengan tujuan mengetahui perbedaan tingkat pengungkapan pada instrumen keuangan sebelum dan sesudah penerapan IFRS No. 7.

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 5. Statistik Deskriptif

Statistics			
		SEBELUM	SESUDAH
N	Valid	15	15
	Missing	0	0
Mean		22,80	44,53
Std. Error of Mean		1,613	1,407
Std. Deviation		6,247	5,449
Minimum		12	34
Maximum		33	56
Sum		342	668

Sumber: Data Diolah Tahun 2017

Berdasarkan tabel statistik deskriptif tersebut dapat diketahui bahwa dari 15 perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun sebelum penerapan IFRS No. 7 di Indonesia rata-rata tingkat pengungkapan pada instrumen keuangan sebesar 22,80 dan sesudah penerapan IFRS No. 7 (ditandai dengan puncak konvergensi IFRS pada 1 Januari 2012), tingkat pengungkapan pada instrumen keuangan meningkat menjadi 44,53. Dengan demikian terjadi peningkatan pengungkapan instrumen keuangan sesudah penerapan IFRS No. 7 di Indonesia.

Pengujian Hipotesis

Tabel 6. Uji t Berpasangan

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pa	Sebelum - sesudah	-21,733	7,440	1,921	-25,853	-17,613	-11,314	14	,000

Sumber: Data Diolah Tahun 2017

Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis diatas menunjukkan bahwa **H₁ diterima** karena -t hitung lebih kecil dari -t tabel atau nilai $-11,314 < -2,14479$ dengan signifikansi sebesar 0,000 (dapat dibaca 0,001). Hasil pengujian hipotesis tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan pada instrumen keuangan sesudah penerapan IFRS No. 7. Dalam penelitian ini memiliki t hitung yang negatif yakni sebesar -11,314

menandakan bahwa tingkat pengungkapan pada instrumen keuangan lebih tinggi sesudah penerapan IFRS No. 7 dibandingkan sebelum penerapan. Hal tersebut senada dengan hasil penelitian dari Yasean A. Tahat dalam penelitiannya berjudul *“The Impact of IFRS 7 on The Significant of Financial Instrument Disclosure : evidence from Jordan”* Yasean melakukan penelitian pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Yordania. Hasilnya menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan instrumen keuangan setelah penerapan IFRS No. 7. Di Yordania pengungkapan pada instrumen keuangan meningkat setelah menerapkan IFRS No. 7.

Hasil uji tersebut juga sesuai dengan teori dan karakter IFRS yang menjelaskan bahwa IFRS berbasis prinsip dan lebih banyak pengungkapan pada instrumen keuangan. Tingkat pengungkapan pada laporan keuangan meningkat dan hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa penerapan IFRS No. 7 sudah maksimal.

Berikut ini merupakan data perbandingan tingkat pengungkapan sebelum dan sesudah penerapan IFRS No. 7.

Tabel 7. Tingkat Pengungkapan Sebelum dan Sesudah Penerapan IFRS No. 7

No	Group of Criteria	Penerapan IFRS No. 7	
		Sebelum	Sesudah
1	Categories of financial assets and financial liabilities	54	59
2	Financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss	7	38
3	Reclassification	40	50
4	Derecognition	3	14
5	Collateral	40	43
6	Allowance account for credit losses	33	43
7	Compound financial instruments with multiple embedded derivatives	0	22
8	Default and breaches	1	6
9	Statement of comprehensive income	15	60
10	Accounting policies	54	59
11	Hedge accounting	21	17
12	Fair value	17	37
13	Qualitative disclosures	29	59
14	Credit risk	3	54
15	Liquidity risk	10	57
16	Market risk	15	50

Sumber: Data Diolah Tahun 2017

Tabel 6 menjelaskan dalam penelitian ini terdapat hal-hal yang membuat pengungkapan instrumen keuangan meningkat setelah penerapan IFRS No. 7 pada perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena beberapa hal salah satunya IFRS No. 7 mengharuskan perusahaan membuat laporan laba-rugi komprehensif yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan pos pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan, yaitu:

- Laba atau rugi neto aset keuangan atau liabilitas keuangan
- Total pendapatan bunga dan total beban bunga.
- Pendapatan dan beban imbalan dari aset atau liabilitas keuangan dan aktivitas wali amanat
- Pendapatan bunga dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai
- Jumlah kerugian penurunan nilai (PSAK No. 60 revisi 2010)

Tabel 6 menunjukkan bahwa sebelum penerapan IFRS No. 7 pengungkapan terhadap pos pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian yang dituangkan dalam laporan laba-rugi komprehensif hanya terdapat pada 14 perusahaan dalam kurun waktu empat tahun (2008-2011) dan seluruhnya terdapat pada laporan keuangan tahun 2011 kecuali PT. Timah (Persero) Tbk. yang lebih dulu menerapkan pengungkapan pada pos-pos dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun 2010 (dapat dilihat pada lampiran 1). Dengan demikian total pengungkapan laporan laba rugi komprehensif sebelum penerapan IFRS No. 7 sebanyak 15 kali pada 14 perusahaan. Namun pengungkapan tersebut meningkat menjadi 60 kali dalam kurun waktu 4 tahun (2012-2015) sesudah penerapan IFRS No. 7. Artinya 15 perusahaan telah menerapkan pengungkapan pada pos-pos dalam laporan laba rugi komprehensif setiap tahunnya dalam kurun waktu empat tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan IFRS No. 7 telah memberikan peningkatan yang signifikan atas pengungkapan terhadap laporan laba rugi komprehensif dimana perusahaan harus mengungkapkan pos beban, pendapatan, keuntungan dan kerugian.

Selain itu peningkatan yang signifikan juga terjadi pada pengungkapan kualitatif (*qualitative disclosure*) dan pengungkapan kuantitatif (*quantitative disclosure*) dimana dalam

pengungkapan kualitatif perusahaan harus menjelaskan segala bentuk risiko yang akan terjadi, penyelesaian masalah dan hukum yang menguatkan. Sedangkan dalam pengungkapan kuantitatif harus terdapat pengungkapan tentang risiko kredit (*credit risk*), risiko likuiditas (*liquidity risk*) dan risiko pasar (*market risk*).

Tabel 6 juga menunjukkan tingkat pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif (risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar) sebelum dan sesudah penerapan IFRS No. 7 dan hasilnya menunjukkan peningkatan yang signifikan seperti pada pengungkapan kualitatif yang sebelum penerapan IFRS No. 7 hanya sebanyak 29 kali dalam kurun waktu empat tahun (2008-2015) dan ketika IFRS No. 7 diterapkan hasilnya meningkat menjadi 59 kali (dapat dilihat pada lampiran 1). Peningkatan tersebut juga terjadi pada pengungkapan kuantitatif dimana pengungkapan kuantitatif ini termasuk didalamnya risiko kredit (*credit risk*) yang meningkat dari 3 kali menjadi 54 kali sesudah penerapan IFRS No. 7, kemudian risiko likuiditas (*liquidity risk*) dari 10 kali menjadi 57 kali dan risiko pasar (*market risk*) yang meningkat dari 15 kali menjadi 50 kali.

Standar laporan keuangan berbasis IFRS didasari oleh *principle based* artinya lebih banyak pengukuran dengan menggunakan pengukuran nilai wajar (*fair value*) yang lebih dapat menggambarkan kondisi kinerja perusahaan (Cahyonowati dan Ratmono, 2012:105). Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang mendukung H_1 diterima. Peningkatan pengukuran nilai wajar sesudah penerapan IFRS No. 7 di Indonesia dapat dilihat ditabel berikut.

Tabel 6 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan terhadap nilai wajar mengingat karakteristik IFRS yang berbasis prinsip dengan memperbanyak pengukuran melalui nilai wajar (*fair value*) yang awalnya hanya sebanyak 17 kali namun setelah penerapan IFRS No. 7 meningkat cukup signifikan menjadi 37 kali.

Selain laporan laba rugi komprehensif, nilai wajar (*fair value*), pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif, sepuluh pengungkapan lainnya mengalami peningkatan yang signifikan sesudah penerapan IFRS No. 7 seperti pada *Categories of financial assets and financial liabilities* yang semula hanya 54 kali meningkat menjadi 59 kali sesudah penerapan IFRS No. 7

dalam kurun waktu 4 tahun (2012-2015), *Financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss* yang semula 7 kali menjadi 38 kali, *reclassification* semula 40 kali menjadi 50 kali, *derecognition* yang semula 3 kali menjadi 14 kali, *collateral* yang semula 40 kali menjadi 43 kali, *Allowance account for credit losses* semula 33 kali menjadi 43 kali, *Compound financial instruments with multiple embedded derivatives* yang semula tidak ada menjadi 22 kali, *Default and breaches* yang semula 1 kali menjadi 6 kali, *Accounting policies* yang semula 54 kali menjadi 59 kali dan *Hedge accounting* yang turun semula 21 kali menjadi 17 kali.

Penerapan IFRS No. 7 di Indonesia telah menandakan bahwa perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang termasuk dalam sampel penelitian ini telah patuh dan mengikuti standar internasional yang diterapkan oleh Indonesia. Hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi investasi di Indonesia karena perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar internasional dan dapat memudahkan bahasa transaksi dalam laporan keuangan. Dengan demikian hal tersebut dapat memudahkan investor maupun calon investor untuk memahami posisi dan kinerja keuangan perusahaan sebagai alat ukur dalam menentukan sebuah investasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil pengujian hipotesis terhadap sampel penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan pada instrument keuangan sesudah penerapan IFRS No. 7 di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil pengujian uji t sampel berpasangan (*paired test sample*) menunjukkan bahwa $-t$ hitung lebih kecil dari $-t$ tabel atau $p\text{-value} < \alpha = 5\%$. $-t$ hitung dalam penelitian ini dihasilkan sebesar -11,314. Hasil tersebut lebih kecil dari $-t$ tabel sebesar -2,14479 atau $p\text{-value}$ sebesar 0,000 (dapat dibaca 0,001) $< \alpha = 0,05$ (5%). Hal tersebut menjelaskan bahwa H_1 diterima yakni terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan instrumen keuangan sesudah penerapan IFRS No. 7 di Indonesia dan tingkat pengungkapan

yang lebih tinggi sesudah penerapan IFRS No. 7 dilihat dari t hitung yang negatif. Hal tersebut terjadi karena peningkatan yang signifikan pada pengungkapan kualitatif dan juga pengungkapan kuantitatif. Data lain yang membuat hasil hipotesis menjadi signifikan yaitu peningkatan pada laporan laba rugi komprehensif yang sebelumnya tidak diterapkan pada standar sebelum IFRS dan juga pengungkapan nilai wajar yang meningkat dikarenakan IFRS yang berbasis prinsip (*principle based*) yang mengharuskan perusahaan lebih banyak mengukur dengan nilai wajar (*fair value*) karena nilai wajar dapat lebih menggambarkan kondisi kinerja keuangan perusahaan. Hasil tersebut juga diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Yasean pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Yordania yang memiliki hasil penelitian bahwa tingkat pengungkapan lebih tinggi setelah penerapan IFRS No. 7 dibandingkan sebelumnya dengan tingkat signifikansi kurang dari 5%.

Saran

1. Bagi Para Pelaku Pasar Atau Investor Atau Calon Investor

Bagi para pelaku pasar atau investor atau calon investor hendaknya lebih memperhatikan setiap pengungkapan yang ada dalam laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut dapat membantu dalam menentukan kelayakan investasi diukur dari kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi pengungkapan akan semakin menggambarkan kondisi kinerja keuangan perusahaan.

2. Bagi Manajemen Perusahaan

Manajemen perusahaan hendaknya lebih memperhatikan penerapan standar IFRS ini. Walaupun standar tersebut menuntut lebih banyak pengungkapan dari standar sebelumnya, namun standar tersebut dapat lebih menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Penerapan standar tersebut diharapkan dapat diterapkan secara penuh oleh manajemen sehingga dapat mempermudah bahasa laporan keuangan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Dalam penelitian ini juga terdapat keterbatasan-keterbatasan diantaranya:
 - a. Peneliti hanya menggunakan sampel kecil yakni 15 sampel dari 42 populasi dikarenakan sulitnya mendapat data laporan keuangan sebelum tahun 2010;
Penelitian ini sebatas untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat pengungkapan pada instrument keuangan sebelum dan sesudah penerapan IFRS No. 7 di Indonesia tidak sampai meneliti faktor apa saja yang menyebabkan penerapan standar tersebut baik secara mikro maupun makro.

DAFTAR PUSTAKA

- Carmona, et al. 2008. *Public space: the management dimension*. New York: Routledge, Taylor&Francis group.
- Choi, Frederich, D.S.Frost, Carol A and Meek, Gary K.1999. *International Accounting* Prentice Hall, Upper Saddle River, NY.
- Joel G Siegel dan Jae K Shim. 2005. *Kamus Istilah Akuntansi*, Cetakan Ketiga, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- #### Jurnal
- Callao, S., Jarne, J. L, & Lainez, J. A. 2007. *Adoption of IFRS in Spain: Effect on the Comparability and Relevance of Financial Reporting*. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, Vol. 16, 148-178.
- Cahyonowati dan Ratmono (2012). *Adopsi IFRS dan Relevansi Nilai Informasi Akuntansi*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 14, No. 2, November 2012: 105-115.
- Yasean A. Tahat Theresa Dunne Suzanne Fifield David M. Power. 2016. *The impact of IFRS 7 on the significance of financial instruments disclosure: Evidence from Jordan*. *Accounting Research Journal*, Vol. 29 Iss 3 pp. 241 – 273.
- Vojácková, Helena. 2015. *Financial Instruments: Meeting Disclosure Requirements Defined by IFRS 7 in Energy Industry in the Czech Republic*. *Accounting Research Journal*. Pp 177-178.

Internet

About IASB and IFRS. <http://www.ifrs.org/> diakses pada November 2016.

Daftar Perusahaan Tercatat. <http://www.idx.co.id/> diakses pada Desember 2016

Dampak Penerapan IFRS.
<http://www.sekolahpasarmodal.idx.co.id> diakses pada Desember 2016

Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Menyampaikan Informasi Keuangan.
<http://www.sampoerna.com/> diakses pada Februari 2017.

Member Organization & Country Profiles - Ikatan Akuntansi Indonesia.
<https://www.ifac.org/about-ifac/membership/members/ikatan-akuntan-indonesia> Diakses pada Februari 2017.

Martani, Dwi. 2010. *Dampak Implementasi IFRS Bagi Perusahaan*.
<http://staff.blog.ui.ac.id/martani/pendidikan/artikel-psak/dampakimplementasi-ifrs/> diakses pada November 2016.

Martani, 2014.
<https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2014/11/Overview-pengantar-perkembangan-standar-akuntansi-keuangan-eff-2015-15122014.pptx> diakses pada Desember 2016

Overview IFRS 7. <http://www.ifrs.org/> diakses pada Desember 2016

Pengertian Standar Akuntansi Keuangan.
<http://www.iaiglobal.or.id> Desember 2016

Peraturan Bapepam No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.
<http://www.martinaberto.co.id/> diakses pada Februari 2017

PSAK 1. 2002. <http://www.iaiglobal.or.id/> Diakses pada Desember 2016.

PSAK 1 Revisi 2009. 2009.
<http://www.iaiglobal.or.id/> Diakses pada Desember 2016

PSAK 2. 2002. <http://www.iaiglobal.or.id/> Diakses pada Desember 2016.

Seberapa Penting Pertemuan G20?. 2014.
<http://www.bbc.com/> diakses pada Februari 2017.

Siaran Pers: IAI IFRS Conference, Perubahan Standar Keuangan Global Berpotensi Guncang Dunia Bisnis di Indonesia.
<http://www.iaiglobal.or.id/> diakses pada Maret 2017.

Tahapan Konvergensi IFRS di Indonesia.
<http://www.iaiglobal.or.id>. diakses pada November 2016.

Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang_undang/Pages/undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal.aspx/ diakses pada Desember 2016.

Wahyuni, 2014. *Principle Based Versus Rule Based*.
<http://etw-accountant.com/principle-based-versus-rule-based/> diakses pada Desember 2016.